

Siaran Pers

PENGELOLAAN DANAU BERKELANJUTAN: SINERGI PROGRAM DAN PERAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

JAKARTA (9/5) – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) menyelenggarakan **Lokakarya Nasional “Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan”** di Jakarta, 9-10 Mei 2017. Pada lokakarya hari pertama yang diselenggarakan di Kementerian PPN/Bappenas, hadir sebagai pembicara, para akademisi, peneliti, termasuk dosen Universitas Helsinki Pasi Lehmusluoto, serta perwakilan kementerian/lembaga. Berbagai isu penting terkait danau, antara lain pengelolaan danau dalam perspektif limnologi, pengelolaan infrastruktur sumber daya air danau secara berkelanjutan, dan pemanfaatan danau yang berwawasan lingkungan menjadi pembahasan utama. Pada lokakarya hari kedua yang dihelat di Hotel Aryaduta, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya beserta para pemimpin daerah akan membahas solusi kebijakan terkait pengelolaan danau, meliputi sisi perencanaan, kelembagaan, hingga regulasi.

Lokakarya Nasional “Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan” juga mengupas kondisi dan permasalahan pengelolaan danau di empat lokasi, yaitu Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Limboto, dan Danau Rawa Pening. Para bupati yang bertindak sebagai pengelola danau, hadir untuk memaparkan secara gamblang realitas yang terjadi dalam mengelola danau di wilayahnya, termasuk terkait isu karakteristik, masalah, dan pengelolaan danau yang berbeda. Penyelenggaraan lokakarya pengelolaan danau memiliki tiga tujuan utama. *Pertama*, mengidentifikasi isu-isu penting dalam pengelolaan danau. *Kedua*, mendapatkan solusi penanganan, mulai dari perencanaan, kelembagaan, dan regulasi yang secara strategis berperan dalam pengelolaan danau berkelanjutan. *Ketiga*, membangun koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan keseimbangan aspek ekologi dan ekonomi dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Indonesia memiliki 840 danau dengan total luas mencapai 7.103 kilometer persegi. Danau berfungsi sebagai sumber daya produktif, baik sebagai sumber air (baku) maupun untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi lainnya. Danau juga berpotensi tinggi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata. Saat ini, pemanfaatan ekosistem danau di Indonesia semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi yang semakin berkembang. Belum maksimalnya sinergi pengelolaan danau antar instansi, antar program, serta antar pemangku kepentingan menambah kompleksitas permasalahan. “Indonesia sebagai negara yang memiliki ratusan danau, perlu melakukan upaya terobosan agar dapat mengatasi permasalahan pengelolaan danau. Penyelamatan danau sangat mendesak untuk ditangani agar danau tetap mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia,” ujar Menteri Bambang.

Multiguna ekosistem danau dalam menopang kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan sistem pengelolaan yang memenuhi kaidah tata ruang yang benar, regulasi dan kelembagaan yang jelas, serta kelestarian fungsi ekosistemnya yang terus terjaga. Lebih lanjut, Menteri Bambang menyampaikan bahwa pemanfaatan ekosistem danau seyogianya selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, serta kepariwisataan. Pengelolaan danau berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, namun membutuhkan upaya

bersama dari berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat. Dengan kata lain, pengelolaan danau berkelanjutan harus merupakan suatu aksi kolektif (*collective action*) dari berbagai berbagai pemangku kepentingan. “Meskipun para pemangku kepentingan umumnya memiliki tujuan yang berbeda, namun dalam upaya pengelolaan dan optimalisasi potensi danau, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki tujuan bersama. Agar *collective action* ini dapat berjalan, maka dibutuhkan koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses,” tegas Menteri Bambang.

Tindak lanjut hasil lokakarya pengelolaan danau berkelanjutan ini adalah untuk memberikan pijakan dalam penyusunan kebijakan, serta membangun sinergi antara pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan danau di Indonesia ke depan. Diharapkan kebijakan tersebut dapat memperkuat perencanaan, kelembagaan, dan regulasi dalam pengelolaan danau di Indonesia mendatang. Pengelolaan danau juga telah menjadi komitmen berbagai negara dalam upaya menyelamatkan keberlanjutan fungsi ekosistem yang saat ini kondisinya dinilai semakin memprihatinkan. Terkait dengan hal tersebut, World Lake Conference (WLC) ke-16 yang diselenggarakan di Bali, November 2016 lalu, merupakan salah satu forum internasional yang bertujuan untuk berbagi dan bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan danau, pengembangan arah kebijakan operasional dalam rangka pemulihan kondisi danau, serta pengelolaan dan pemanfaatan danau yang seimbang antara konservasi dan ekonomi.

Jakarta, 9 Mei 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650;
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id